

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

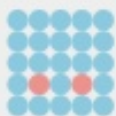
Ikan tuna sebagai salah satu sumber bahan baku bagi perekonomian Indonesia memegang peran yang cukup penting, mengingat potensi sumberdaya ikan tuna di perairan Indonesia tersedia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Komoditas ikan tuna beserta produk-produk turunannya mempunyai daya keunggulan komparatif di pasar lokal maupun internasional, kemampuan sektor perikanan tuna cukup besar untuk menciptakan kesempatan usaha bisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat perikanan.

Ditunjang oleh keadaan alamnya, luasnya wilayah perairan Indonesia, dan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah, Indonesia menjadi negara eksportir terbesar kedua setelah Thailand di kawasan ASEAN. Ditinjau dari segi dari potensi sumberdaya, Thailand tidak memiliki potensi yang besar seperti Indonesia. Komoditas hasil perikanan Thailand ini diperkirakan justru berasal dari perairan ZEE Indonesia (LMAA IPB, 2001). Menurut Bungaran Saragih (2001) dimasa akan datang, kesempatan subsektor perikanan untuk tumbuh masih terbuka luas, baik dilihat dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, Indonesia memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> (perairan Indonesia dan territorial 3,1 juta km<sup>2</sup>, perairan ZEE 2,7 juta km<sup>2</sup>) dan garis pantai sekitar 90 ribu km (terpanjang di dunia) yang merupakan basis kegiatan ekonomi perikanan.



© Hak Cipta Milik IPB

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor

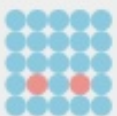
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka usaha-usaha menjadikan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sangat mungkin dilakukan mengingat potensi sumber daya perikanan di Indonesia sangat melimpah. Sampai saat ini usaha perikanan nasional masih banyak didominasi oleh usaha dengan skala kecil (perikanan rakyat) yang menggunakan modal investasi terbatas, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi musim dan untuk konsumsi lokal.

### 1.1.1. Perkembangan Konsumsi Ikan Tuna

Dewasa ini permintaan ekspor ikan tuna cenderung meningkat dibandingkan dengan produk lain. Adanya peluang pasar internasional ini, harus didukung oleh strategi pemasaran internasional yang memadai. Meningkatnya ekspor ikan tuna menunjukkan bahwa proses perencanaan pemasaran dilakukan bukan hanya setelah produk siap untuk dijual, melainkan telah dilakukan sejak proses penangkapan, penanganan pascapanen hingga pada strategi pemilihan produk dan pasar yang kompetitif.

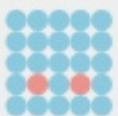
Pasar domestik Indonesia juga merupakan potensi yang belum termanfaatkan secara optimal. Peluang ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya restoran-restoran *seafood* dan makin banyaknya supermarket yang menjual daging ikan tuna. Untuk itu perlu dipelajari pola dan kecenderungan konsumsi ikan dalam negeri. Saat ini konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita sekitar 19,04 kg/tahun. Apabila konsumsi per kapita ditargetkan sebesar 22 kg/tahun saja, maka pasar domestik masih memerlukan tambahan pasokan lebih





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB  
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor

dari 0,5 juta ton/tahun. Dengan demikian, pasar domestik masih sangat menjanjikan. Bahkan tingkat konsumsi ini masih dapat ditingkatkan lagi jika disertai dengan upaya sosialisasi makan ikan kepada seluruh penduduk di pelosok tanah air. Perubahan menu makanan, khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas cenderung lebih senang mengunjungi tenda-tenda *seafood* atau *seafood restaurant*. Jumlah tempat-tempat penjualan makanan tersebut tampak terus bertambah. Pihak produsen harus senantiasa memperhatikan tingkat pendapatan konsumen di Indonesia, yang merupakan salah satu faktor pertimbangan bagi produsen untuk menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh sebagian besar jumlah penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Potensi pasar domestik juga dapat terlihat dari kecenderungan meningkatnya permintaan hasil perikanan tuna Indonesia untuk digunakan sebagai bahan baku industri. Dewasa ini pemerintah semakin mengembangkan diversifikasi usaha pada bidang industri pengolahan. Dengan demikian, hasil perikanan tuna yang tidak dapat dikonsumsi sebagai ikan segar, dapat ditangani dengan pengolahan pasca panen.

Tujuan ekspor utama hasil ikan tuna Indonesia adalah Jepang, Singapura, Eropa, Amerika Serikat dan lain-lain. Negara-negara tersebut merupakan tujuan utama yang menyerap lebih dari dua pertiga ekspor Indonesia.



Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia menurut negara tujuan ekspor tersebut disajikan dalam Tabel 1

Tabel 1. Negara Tujuan Utama Ekspor Perikanan Indonesia Tahun 2002.

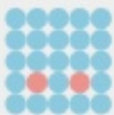
No	Negara Tujuan Ekspor	US\$	%
1	Jepang	67.413.701	74,60
2	Singapura	7.844.209	8,68
3	Eropa dan Australia	6.419.141	7,10
4	USA	5.821.183	6,44
5	Thailand	2.734.765	3,03
6	Korea Selatan	138.671	0,15

Sumber : BPS 2003

Pemasaran jenis Tuna memiliki peluang yang cukup baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Perkembangan ekspor ikan tuna dalam 9 tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata 25,70%. Ekspor tersebut sebagian besar dalam bentuk beku, segar dan tuna dalam kaleng. Negara tujuan utama ekspor ikan tuna Indonesia adalah Jepang, negara tujuan lainnya yaitu USA, Philipina, Thailand dan Eropa. Jepang merupakan sentral pasar tuna dunia. Oleh karena itu persaingan di pasar internasional di Jepang sangat ketat. Negara-negara pesaing Indonesia di pasar internasional antara lain Australia, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan dan Guam. Peluang pasar ikan tuna di beberapa negara importir utama masih cukup terbuka. Impor ikan tuna pada tahun 1997 sebesar 1.101.646 ton. Indonesia baru mencapai pangsa pasar dunia sebesar 7,52%. Sehubungan dengan itu ekspor ikan tuna masih dapat ditingkatkan karena Indonesia memiliki sumberdaya yang cukup besar. Sentra-

© Hak Cipta Milik IPB

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

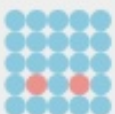
sentra produksi ikan tuna di Indonesia adalah perairan Maluku, Irian Jaya, Sulawesi dan Pantai Barat Sumatera.

### 1.1.2. Perkembangan Penangkapan Ikan Tuna

Potensi ikan tuna di Indonesia diperkirakan sebesar 374.047 ton. Potensi tersebut tersebar di wilayah perairan Samudera Pasifik sebanyak 260.993 ton dan di Samudera Hindia sebanyak 113.054 ton. Penyebaran tuna di perairan Indonesia sebagian besar terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Potensi tuna terbanyak di perairan Indonesia terdapat di Laut Sulawesi-Utara, Irian Jaya dan yang terkecil di Laut Arafura. Tingkat pemanfaatan di Laut Arafura telah berada pada level padat tangkap walaupun belum sampai pada tahap yang membahayakan terhadap kelestarian sumberdaya tuna. Tingkat pemanfaatan di Laut Flores dan Selat Makassar telah mengalami lebih tangkap dan berbahaya terhadap kelestarian tuna di perairan tersebut. Namun demikian, tingkat pemanfaatan di sebagian besar wilayah penyebaran tuna masih relatif kecil. Dengan kondisi ini, maka posisi Indonesia sebagai penghasil tuna di dunia akan semakin kuat di masa yang akan datang.

### 1.1.3. Kebijakan Pemerintah

Perairan laut bersifat *common property* atau perairan itu adalah milik bersama, sehingga siapa pun dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di dalamnya. Agar tidak terjadi konflik diantara pemanfaat laut, maka dibuat undang-undang dan atau peraturan-



peraturan perikanan, baik yang berlaku secara lokal, nasional, regional maupun internasional. Masyarakat pengguna laut harus mematuhi aturan main yang berlaku.

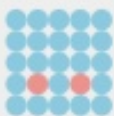
Beberapa produk hukum Pemerintah yang digunakan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan diantaranya adalah

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- b. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di ZEEI ;
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1993 tentang Usaha Perikanan;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan Bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Harimau (Trawl) ;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang ;
- h. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan ;



© Hak Cipta Milik IPB

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



MB-IPB  
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



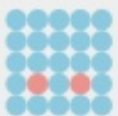
- i. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 995 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perikanan ;
- j. Perizinan dan Peraturan lain yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pembangunan usaha perikanan tuna merupakan bagian integral dari pembangunan perikanan tangkap secara nasional yang diarahkan untuk menunjang terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur secara materiel dan spiritual. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tetap mengacu kepada GBHN (1999–2004). Komitmen ini wajib dijadikan pedoman bagi semua perusahaan yang bergerak dibidang usaha penangkapan ikan.

PT. Mikaindo Abadi Cemerlang merupakan salah satu perusahaan nasional yang berusaha memenuhi keinginan tersebut di atas, dengan menerapkan kerja sama dengan pola kemitraan. PT. Mikaindo Abadi Cemerlang adalah perusahaan penangkapan, pembekuan serta eksportir ikan tuna. Dalam kegiatannya PT. Mikaindo Abadi Cemerlang menjalankan pola kemitraan dalam penangkapan ikan tuna. Dalam pelaksanaan pola kemitraan PT. Mikaindo Abadi Cemerlang melakukan kerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Citra Mina Abadi (KSU CMA) sebagai plasma yang dalam hal ini menyediakan anggota koperasi sebagai tenaga kerja penangkap (nelayan). Jumlah nelayan yang tergabung dalam KSU CMA sampai dengan Bulan Desember 2002 sebanyak 1.100 orang.

© Hak Cipta Milik IPB

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



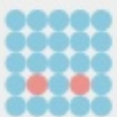
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
**MB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor  
MB-IPB

Nelayan-nelayan tersebut tergabung dalam  $\pm 100$  kelompok yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Citra Mina Abadi. Banyaknya persoalan berupa kendala yang dihadapi nelayan plasma adalah terbatasnya modal, *skill* atau penguasaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi musim dan kurangnya akses pasar serta keterbatasan dalam memprediksi pasar yang sangat fluktuatif setiap saat.

#### 1.1.4. Perkembangan Kemitraan di PT. Mikaindo Abadi Cemerlang

PT. Mikaindo Abadi Cemerlang merupakan salah satu perusahaan penangkapan ikan tuna yang terintegrasi yang bergerak mulai dari penangkapan ikan, pemotongan, pembekuan sampai dengan diekspor ke luar negeri. PT. Mikaindo Abadi Cemerlang melakukan pola kemitraan dengan menjalin kerja sama dengan nelayan setempat sejak pertengahan tahun 2000. Awalnya kerja sama ini kemitraan dibentuk karena adanya keluhan dari para nelayan mengenai masalah pembagian hasil dari para perusahaan pengolah dan eksportir ikan tuna yang ada di daerah Bitung dan sekitarnya.

#### 1.2. Identifikasi Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam program kemitraan adalah terwujudnya kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dan saling memperkuat serta saling percaya antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Pola kemitraan dalam penerapannya mensyaratkan

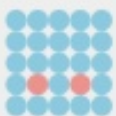




kerjasama antara para pelaku ekonomi yaitu pengusaha menengah, dengan pengusaha kecil dengan prinsip hubungan saling percaya, saling memiliki, saling melindungi, dan saling menguntungkan. Guna memperkokoh kerja sama bisnis dengan pola kemitraan ini, para pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai posisi yang sejajar.

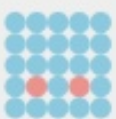
Ketergantungan salah satu pihak terhadap pihak lain merupakan salah satu kendala yang umumnya terjadi. Ketergantungan ini dapat terjadi pada hubungan antara pengusaha menengah atau besar dengan pengusaha kecil. Pola kemitraan yang menggantungkan salah satu pihak ini cenderung menjadi bentuk hubungan yang tidak adil, eksploitatif, dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Oleh karena itu kerja sama kemitraan ini perlu kemandirian dalam posisi yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Tantangan kemitraan usaha bersama bisa terjadi karena adanya perbedaan orientasi dan budaya kerja. Nelayan seringkali kesulitan untuk mengikuti budaya industrial yang dibawakan oleh mitra kerjanya. Sebaliknya industrialis juga mengalami kesulitan untuk menerima kondisi dan sikap tradisional yang dibawakan nelayan. Kunci untuk mengatasi masalah tersebut adalah adanya pemahaman atas kondisi masing-masing dan adanya kesempatan untuk berkomunikasi bagi semua pihak yang didorong oleh kepentingan dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama.



Terjadinya kegagalan dalam pola kemitraan ini juga disebabkan antara lain karena perusahaan besar sebagai inti yang merasa lebih kuat posisinya menginginkan keuntungan yang lebih besar tanpa memperdulikan nasib nelayan plasma, tidak adanya keterbukaan dalam kerja sama kemitraan, dan kurangnya pembinaan serta pengawasan yang diberikan perusahaan inti kepada nelayan mitranya. Beberapa kelemahan dan keterbatasan yang melekat pada pengusaha kecil (nelayan plasma) diantaranya adalah modal, *skill* atau penguasaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi musim dan kurangnya akses pasar serta keterbatasan dalam memprediksi pasar yang sangat fluktuatif setiap saat. Kelemahan yang dimiliki nelayan plasma tersebut membuat posisi dan daya tawar nelayan plasma sangat ditentukan oleh peran dominan perusahaan inti. Seringkali model kerjasama kemitraan tertentu dapat memberatkan dan merugikan nelayan plasma, sementara nelayan plasma dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan. Dalam penjelasannya **Suharno (1997)** mengatakan bahwa dalam berbagai kasus pada umumnya program kemitraan menempatkan pihak nelayan plasma pada posisi yang lemah dan cenderung lebih sering mengalami kerugian. Dengan posisi tawar menawar nelayan plasma yang lemah ini dapat menyebabkan kurang seimbangnnya pembagian hasil yang diterima oleh nelayan plasma.

Alternatif dalam pembiayaan modal kerja bagi nelayan plasma, tidak hanya berasal dari perusahaan inti, namun bisa berasal dari bank. Meskipun saat ini alternatif pembiayaan untuk modal kerja nelayan dapat





dipenuhi dari bank, namun nelayan plasma enggan menggunakan sumber dana dari kredit bank tersebut.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi masalah mengenai kurang seimbangnya rasio pembagian laba yang diterima oleh nelayan plasma akibat posisi tawar menawar nelayan plasma yang lemah dalam penangkapan ikan tuna dengan pola kemitraan. Hal tersebut bisa dilihat kurangnya minat para nelayan yang ikut bergabung dalam Koperasi Serba Usaha Citra Mina Abadi. Disamping itu adanya masalah keengganan nelayan plasma menggunakan kredit bank sebagai sumber dana untuk modal kerjanya.

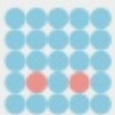
### 1.4. Perumusan Masalah

Lemahnya posisi nelayan plasma dibandingkan perusahaan inti, seringkali mengakibatkan rendahnya rasio penetapan laba yang diterima nelayan plasma. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna dimungkinkan terjadinya rasio pembagian laba yang kurang seimbang antara perusahaan inti dengan nelayan plasma. Berkaitan dengan pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mikaindo Abadi Cemerlang sebagai perusahaan inti dengan nelayan plasma, maka dalam penelitian ini yang akan dibahas :

- a. Bagaimana rasio pembagian laba antara perusahaan inti dengan nelayan plasma dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



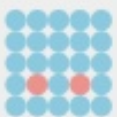
MB-IPB  
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis  
Institut Perikanan Bogor  
MB-IPB

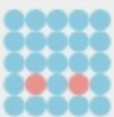
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- b. Apakah rasio pembagian laba yang diterima oleh nelayan plasma telah sesuai dengan kontribusi input yang diberikan dalam proses produksi.
- c. Berapa besarnya perbandingan rasio penetapan pembagian hasil antara perusahaan inti dengan nelayan plasma dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna.
- d. Apakah penggunaan sumber dana dari bank lebih menguntungkan bagi nelayan plasma dari pada pemberian modal kerja dari perusahaan inti.

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari kajian penetapan rasio pembagian hasil antara perusahaan inti dengan nelayan plasma dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis rasio kontribusi biaya input dari nelayan plasma dan perusahaan inti dalam proses penangkapan ikan tuna dengan pola kemitraan.
- b. Menganalisis besarnya laba dan rasio perbandingan penerimaan laba yang diterima oleh nelayan plasma dan perusahaan inti dari penangkapan ikan tuna dengan pola kemitraan.
- c. Menganalisis kesesuaian penetapan rasio pembagian laba dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna dengan kontribusi input yang diberikan masing-masing pihak.
- d. Menganalisis manfaat penggunaan sumber dana bank bagi modal kerja nelayan.



## 1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada manajemen PT. Mikaindo Abadi Cemerlang dan masyarakat pada umumnya tentang :

- a. Pembagian laba antara perusahaan inti dengan nelayan plasma dalam bisnis penangkapan ikan tuna dengan pola kemitraan yang selama ini telah dilakukan.
- b. Menentukan besarnya rasio pembagian laba antara perusahaan inti dan nelayan plasma dalam penangkapan ikan tuna yang sesuai dengan kontribusi input.
- c. Besarnya laba yang akan diterima nelayan plasma bilamana menggunakan modal kerja dari kredit bank.

## 1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian bisnis mengenai rasio pembagian laba antara perusahaan inti dengan nelayan plasma dalam pola kemitraan penangkapan ikan tuna di PT. Mikaindo Abadi Cemerlang. Disamping itu dikaji pula alternatif penggunaan sumber dana bank sebagai modal kerja nelayan plasma.